

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arief Budiman. *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- C.F Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konsititusi Dunia* (terjemahan). PT. Nuansa Media. Bandung.
- Charles Simabura. 2011. *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Fatmawati. 2005. *Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT. Rajawali Pers. Jakarta.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- Imam Soebachi. 2016. *Hak Menguji Materiil*. PT. Sinar Grafika. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1992. *Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara menurut Undang-Undang*. PT. Bina Ilmu. Surabaya.

Saldi Isra. 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi Edisi Kedua*. Rajawali Press. Jakarta.

Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar. 2018. *Parlemen Dua Kamar Analisis Perbandingan Menuju Sistem Bikameral Efektif*. Genta Publishing. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

Umbu Rauta. 2016. *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. PT. Genta Publishing. Jakarta.

Yuliandri. 2013. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Rajawali Press. Jakarta.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

### **C. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVI/2016 tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pegujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **D. Tesis, Jurnal, Website dan Surat kabar**

Charles Simabura dkk. 2018. *“Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 56/PUU-XIV-2016”*. Penelitian Hibah Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Gede Marhaedra Atma Wijaya. 2018 *“Mendefenisikan kembali Wewenang dan Tugas DPD RI”* bahan materi pada Dialog DPD RI bersama Pemerintahan Daerah, dilaksanakan di The Kuta Beach Heritage Bali, tanggal 19 April 2018.

Muchamad Ali Safa'at. 2011. *“Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dan Proses Penyerap Aspirasi”*. Jurnal Hukum. Volume 1.

Seminar Nasional oleh Drs. Bahar Ngitung, MBA sebagai ketua PULD DPD RI dengan tema: *“Peta Permasalahan Hukum Daerah Dan Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dalam Pemantauan Dan Evaluasi Ranperda Dan Perda”* Kerjasama Panitia Urusan Legislasi Daerah (PULD) DPD RI dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, tanggal 24 Mei 2019.

<https://hukum.tempo.co/read/1048929/revitalisasi-kewenangan-dewan-perwakilan-daera/full&view=ok>.

<https://ppid.dpr.go.id>, Risalah Sidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

